

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor penunjang yang menyebabkan SiLPA itu terjadi dan cukup fluktuatif di tiga tahun periode anggaran yakni antara lain:

1. Tidak terbayarnya uang gaji kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan terhadap BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
2. Tidak terbayarkan sebagian operasional kantor dan perjalanan dinas.
3. Tidak dicairkan dana tahap III sebesar 40% dari pagu anggaran APBDes pada tahun 2018.
4. Manajemen konsultasi yang belum kondusif.
5. Adanya keterlambatan dalam pengerjaan program fisik yang menghambat penyerapan dana tahap II pada tahun 2018.

6.2 Saran

Penulis memberi saran kepada beberapa pihak dalam mengatasi terjadinya SiLPA di Desa Wato Baya :

1. Bagi Pemerintah Desa Wato Baya untuk terus meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan dan administrasi desa secara berkala. Harus dibuatkan skedul atau jadwal secara teratur agar proses penyusunan perencanaan kegiatan penetapan APBDes, pelaksanaan

APBDes dan pelaporan APBDes tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pengerjaan program fisik maka perlu ada kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia material baik lokal maupun non lokal. Perlu adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, pembinaan ke masyarakatan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Kecamatan Adonara Barat dalam hal ini Rekomendasi pencairan dana dari kecamatan tidak perlu kolektif karena dapat menghambat proses kegiatan di desa-desa yang sudah direncanakan. Dalam pembuatan rekomendasi pencairan dana tidak perlu ada aturan lokal misalnya laporan belum masuk maka tunjangan aparatur Pemerintahan Desa di tahan. Kegiatan evaluasi APBDes harus tepat waktu sehingga tidak mempersulit aparatur desa dalam menyusun dan merencanakan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Harif Tanjung. 2009. *Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah*. Bandung: ALFABETA

Ariantini, Ivo. 2016. *Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (Studi di Pemerintah Desa Se-Kabupaten Belitung)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.

Kementrian keuangan, 2015.5 *penghambat penyaluran dana desa*. [Http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/25/203018226/menteri.desa.akui.ada.dana.desa.tak.tepat.sasaran](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/25/203018226/menteri.desa.akui.ada.dana.desa.tak.tepat.sasaran)

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : ERLANGGA.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa

Siti, Hotimah. 2015. *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 Dan Dana Desa Sesuai PP RI No. 22 Tahun 2015*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN).

Sofyan Syafri Harahap, 2008, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Zakiah. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.